

**PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Zelvia Irfina

NPP. 30.0486

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*

*Program Studi Keuangan Publik*

E-mail: Zelviairfn@gmail.com

Dosen Pembimbing: Haromin., S.Sos., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This study departs from the problem of dependence on financial assistance from the center providing a view of regional finances that are not managed properly which indicates that the financial independence of the Bandar Lampung City area is still low. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the causes of the lack of Regional Original Income (PAD) in Bandar Lampung. **Methods:** This research method uses a qualitative approach with inductive thinking using several financial ratios, namely, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of regional financial independence. While the data used in this study is data from the Bandar Lampung City Budget Realization Report (LRA) for 2017-2020. The data collection techniques used are interviews with 6 people from the area of financial management in the city of Bandar Lampung and documentation with related documents. **Result:** The results of the ratio measurement obtained by taking the average results of the 4 fiscal years of the City of Bandar Lampung are: good criteria, the ratio of the degree of dependence 44.65% on the dependency criteria with high categories, and the ratio of financial independence 96.18% on the criteria that is delegative. The inhibiting factors that cause the less than the maximum of Regional Original Income (PAD) are the low PAD received, the less than the maximum income from BUMD and the existence of a national budget*

*policy. Efforts to increase Regional Original Income (PAD) by simplifying systems and procedures for collecting regional taxes and levies, including strengthening the regulations that govern; Efforts made to overcome the lack of BUMD's contribution in increasing PAD are following up on laws and regulations, improving BUMD's institutions, conducting routine guidance and supervision in the running of BUMD management, and carrying out various activities to support its implementation by forming a BUMD. **Conclusion:** The results of the ratio measurement obtained by taking the average results of the 4 fiscal years of the City of Bandar Lampung airly good criteria, the ratio of the degree of dependence 44.65% on the dependency criteria with high categories, and the ratio of financial independence 96 .18% on the criteria that is delegative. The inhibiting factors that cause the less than the maximum of Regional Original Income (PAD) are the low PAD received. Efforts to increase Regional Original Income (PAD) by simplifying systems and procedures for collecting regional taxes and levies, including strengthening the regulations that govern.*

**Keywords:** *Local Government, Regional Original Income, BUMD, Budget Politics*

#### **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini diambil dari Permasalahan adanya ketergantungan bantuan dana dari pusat tersebut memberikan pandangan tentang keuangan daerah yang tidak dikelola dengan baik yang menandakan bahwa masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir induktif menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandar Lampung tahun 2017-2020. Adapun teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara dengan 6 orang dari bidang pengelolaan keuangan daerah Kota Kota Bandar Lampung dan dokumentasi dengan dokumen terkait.

**Hasil/Temuan:** hasil pengukuran rasio yang didapat dengan diambil rata-rata hasil dari 4 tahun anggaran Kota Bandar Lampung yaitu rasio derajat desentralisasi 41,26% pada kriteria yang terbilang baik, rasio derajat ketergantungan 44,65% pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi, dan rasio kemandirian keuangan 96,18% pada kriteria yaitu delegatif. Faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rendahnya PAD yang diterima, kurang maksimalnya pendapatan yang bersumber dari BUMD dan adanya politik anggaran nasional. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan yang mengatur; Upaya yang dilakukan dalam mengatasi minimnya kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD adalah menindaklanjuti peraturan perundang undangan, perbaikan kelembagaan BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam berjalannya pengelolaan BUMD, serta melakukan berbagai kegiatan guna mendukung implementasinya dengan pembentukan tim pembinaan BUMD. **Kesimpulan:** hasil pengukuran rasio yang didapat dengan diambil rata-rata hasil dari 4 tahun anggaran Kota Bandar Lampung yaitu rasio derajat desentralisasi 41,26% pada kriteria yang terbilang baik, rasio derajat ketergantungan 44,65% pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi, dan rasio kemandirian keuangan 96,18% pada kriteria yaitu delegatif. Faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan.

**Kata kunci :** Pemerintah Daerah, PAD, BUMD, Politik Anggaran



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wewenang Pemerintahan Daerah dalam mengatur pemberdayaan masyarakatnya telah diatur dalam undang-undang. Otonomi daerah dengan mengedepankan prinsip demokrasi perlu beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat agar diperoleh tata pemerintahan yang lebih baik. Terbentuknya kemandirian daerah guna mengurangi subsidi dana dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai dari adanya pelimpahan wewenang kepada masing-masing daerah otonom. Kemandirian daerah yang dimaksud bisa terealisasi bila dalam pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Menurut (Halim, 2002) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu, kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahannya dan ketergantungan yang tinggi atas bantuan pusat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Pelaksanaan sistem otonomi daerah harus dapat mampu mengimbangi dengan meningkatnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola daerahnya. Tanggung jawab tersebut termasuk dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang dimana pendapatan daerah dapat menentukan tingkatan kemandirian pada suatu daerah.

Menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Tentang Hak dan Kewajiban Daerah. Salah satu dari hak dan kewajiban daerah tersebut menjelaskan tentang upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk menunjang kemandirian daerah yaitu dengan memungut pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini nantinya akan memberikan imbalan atau balasan secara tidak langsung dan tujuan dari pungutan tersebut yaitu untuk membangun daerah menjadi lebih baik dengan membiayai kebutuhan fasilitas-fasilitas daerah dan mensejahterakan masyarakat. Tingkat kemandirian keuangan daerah berkaitan

menggunakan keahlian Pemerintah Daerah dalam mengelola Pendapatan asli daerah.

Bila Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan dalam membuat Pendapatan asli daerah tinggi dibandingkan dengan ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka taraf kemandirian keuangan daerah tersebut dapat diasumsikan dengan baik ( Komarudin, 2001).. Kepala daerah yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah harus memiliki kemampuan yang dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan yang berguna bagi rakyat dengan tetap mengikuti peraturan undang- undang, serta melakukan peninjauan sistem secara berkelanjutan. Tugas kepala daerah sebagai pengelola keuangan tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia tidak hanya besarannya saja, namun juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan serta lain-lain. umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. pada era otonomi daerah mirip ketika ini peran daerah dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara ialah faktor yang esensial. Pemerintah daerah bahkan berlomba lomba untuk mendapatkan repatriasi dana yang besar dari pemerintah pusat. Mekanisme alokasi serta distribusi tidak pelak sebagai mekanisme utama penentu repatriasi anggaran kepada Pemerintah Daerah. Masalahnya, tuntutan mempertinggi Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai arti beda bagi masing-masing daerah.

Salah satu daerah yang memiliki wewenang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah Kota Bandar Lampung. Diakses dari <https://bandarlampungkota.go.id/>, target realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, realisasi mencapai angka 83,37%. Namun, di tahun 2019-2021 terdapat penurunan yang besar, dimana target realisasi hanya mencapai 70% saja. Dapat dipahami

bahwa penurunan realisasi target PAD menandakan bahwa semakin berkurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi daerahnya.

Sedangkan untuk mendukung kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, serta pembangunan supaya berjalan lancar, membutuhkan dana yang memadai guna menyejahterakan masyarakat (Widjaja, 2002). Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memaksimalkan potensi daerahnya supaya penerimaan dari PAD semakin tinggi sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusannya tanpa adanya bantuan dari pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih tema dan judul mengenai “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung”.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya ketergantungan bantuan dana dari Pemerintah Pusat tersebut memberikan pandangan tentang keuangan daerah yang tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu juga diperlukan analisis terhadap Pendapatan asli daerah berupa perhitungan rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, serta rasio kemandirian dalam menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penulis dalam melakukan penelitian. Pertama, penelitian dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon". Penelitian milik Krest D Tolosang (2018) menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-



sama PAD dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.

Kedua, penelitian pada tahun 2016 milik Manasep Orocomna dengan judul "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Hasil dari riset ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat kurang. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD belum bisa diandalkan bagi daerah karena rendahnya sumber pendapatan dari retribusi dan pajak.

Ketiga, penelitian milik Dwi Purnamasari (2019) dengan judul "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014". Penelitian ini menggunakan metode campuran berupa kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah rasio kemandirian yang telah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki status kemandirian yang rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Kontribusi dari PAD terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo masih terbilang rendah. Kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk eksekutif maupun legislatif dalam menunjang PAD yang berpengaruh terhadap besaran peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus terhadap analisis terhadap Pendapatan asli daerah berupa perhitungan rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, serta rasio kemandirian dalam menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menggambarkan kontribusi Pendapatan asli daerah dalam menunjang Kemandirian Keuangan daerah pada Kota Bandar Lampung melalui pengukuran rasio derajat ketergantungan, rasio derajat desentralisasi, serta rasio kemandirian. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung. Serta, upaya Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **II. METODE**

Menurut Neuman, penelitian kualitatif berusaha mengembangkan teori selama proses pengumpulan data. Penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel karena memungkinkan data dan teori saling berinteraksi. (Neuman, 2006) Sumber data yang diperoleh pada penelitian kualitatif adalah data yang apa adanya. Sehingga, data penelitian dapat berkembang ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung.

Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menolak menggunakan angka-angka dan statistik dalam penyajian analisis data. Penelitian kualitatif yang dilakukan secara mendalam akan mampu membangun suatu hubungan antarfenomena yang terjadi (Sugiyono, 2016). Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan induktif (bottom up) dimana hasil yang dipaparkan berupa kajian dari khusus ke umum, yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum dan sistematis dari seluruh fakta empiris di lapangan.

Nazir mendefinisikan pengumpulan data sebagai prosedur sistematis guna memperoleh data yang diperlukan, sehingga selalu terdapat keterkaitan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2011). Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian yang



tujuan utamanya berupa memperoleh data (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuagandan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Sedangkan sumber data sekunder yang berperan sebagai data pendukung diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Keuangan**

Definisi yang berkaitan dengan analisis menurut Nazir (2011) , yaitu “Analisis adalah suatu kegiatan pengelompokkan data, memanipulasi data, menyusun data berdasarkan suatu urutan, serta mempersingkat data dengan jelas agar mudah untuk dibaca”. Sedangkan berdasarkan pendapat (Komarudin, 2001) bahwa analisis adalah suatu proses dengan berpikir dalam menguraikan keseluruhan menjadi suatu komponen, memiliki hubungan satu dengan yang lain dan masing-masing memiliki fungsi dalam satu keseluruhan terpadu.

Menurut (Mardiasmo, 2002) pengertian keuangan daerah adalah “Pekerjaan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu berbentuk uang (rupiah)”. Adapun pengertian keuangan daerah menurut (Widjaja, 2002), yaitu “Penyelenggaraan pemerintahan meliputi segala hak dan kewajiban termasuk segala bentuk kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwasannya penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode tertentu diperlukan adanya anggaran dan pembiayaan dalam pemerintah daerah agar perencanaan tersebut dapat terlaksana.

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan dari penjelasan para ahli diatas ialah jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan tergantung pada kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sehingga keuangan

daerah menjadi faktor yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan. Keuangan daerah meliputi segala hak serta kewajiban yang dapat dinilai menggunakan uang. Hak serta kewajiban tadi tergantung dengan bagaimana Pemerintah Daerah bisa mengelola keuangan sampai terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah.

### **3.2 Keuangan Daerah**

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **3.3 Rasio Kemandirian Keuangan**

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan besaran kemampuan dari suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan daerah dan pelayanan umum kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak sebagai bantuan pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Pengukuran rasio juga dapat menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat. Pengukuran rasio ini juga dapat melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang dilihat melalui pembayaran retribusi dan pajak. Berikut terdapat rasio untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah dan juga digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menggambarkan derajat besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total yang didapat dari penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD yang dihasilkan maka kemampuan daerah Dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin tinggi juga. Pada dasarnya pengukuran rasio ini dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dengan menghitung besaran kontribusi. Dalam menunjang PAD untuk mendukung pembiayaan otonomi daerah. Rasio derajat desentralisasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung rasio derajat desentralisasi (Mahmudi 2019:140)

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio derajat ketergantungan daerah keuangan daerah menggambarkan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap penerimaan dana transfer dari pusat. Perhitungan rasio derajat ketergantungan keuangan daerah didapat dengan melakukan perbandingan antara jumlah penerimaan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Dalam pengukuran rasio ini menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi 2019) :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Penggunaan rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah Dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat sebagai imbalan secara tidak langsung atas pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dipungut sebagai penerimaan daerah. Dengan menggunakan Rasio ini juga dapat menghitung seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Apabila penghitungan yang dihasilkan tinggi maka kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan



retribusi daerah dapat dikatakan tinggi. Perhitungan rasio kemandirian ditunjukkan dengan besarnya perolehan PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah. Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian yaitu (Mahmudi 2019:140):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

### 3.4 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Istilah otonom secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos (peraturan atau undang-undang). Sehingga dapat diartikan otonomi merupakan suatu aturan sendiri atau undang-undang sendiri yang dapat berkembang menjadi pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah yang kemudian dipercaya untuk bisa mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam rangka diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, (Mahmudi, 2019) berpendapat “Setiap Pemerintah Daerah didesak untuk mempunyai kemandirian keuangan daerah yang besar.” Dengan demikian dari pernyataan tersebut dapat meminimalisir ketergantungan dari pihak eksternal berupa bantuan keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang Dalam mengelola keuangan daerah dapat menentukan kebijakan yang menjadi prioritas Dalam mengelola keuangan sehingga diharapkan mampu selaras dengan kepentingan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Konsekuensi yang diberikan kepada Pemerintah Pusat kepada daerah dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tentu akan menunjang program transfer fiskal kepada Pemerintah Daerah. Transfer dana memberikan Pemerintah Daerah keleluasaan dalam bergerak sebagai upaya ikut berperan dalam menentukan perumusan yang diperoleh dari hak otonom dan desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan yang diberikan ke daerah adalah untuk mengatur dan mengelola potensi daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah. Daerah yang telah mampu menggali sumber potensi daerah dan mengelolakeuangannya sendiri untuk

melaksanakan urusan pemerintahan maka tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai pendukung dalam pembiayaan urusan pemerintahan daerah

### **3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini dimaksudkan untuk menunjang kualitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan keuangan daerah yang terdapat di dalam peraturan ini melibatkan aliran data, informasi, penyajian dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen yang dimaksud tersebut tersaji pada bentuk ilustrasi dokumen dapat berupa contoh gambaran dari informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat dinamis.

### **3.6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dengan adanya penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, serta terjadinya perubahan atas standar akuntansi pemerintahan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada bagian ini akan menyajikan hasil penelitian tentang riset yang telah penulis lakukan. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan anggaran yang digunakan sebagai belanja pemerintahan Kota Bandar Lampung, dalam menutupi belanja daerahnya masih yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari sumber potensi pada pendapatan daerahnya yang ikut berkontribusi dalam belanja daerah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu untuk memenuhi keseluruhan belanja daerah tersebut sehingga adanya Dana Transfer dari pusat menjadi sumber pendapatan lain yang penting dalam memenuhi belanja daerahnya. Berikut merupakan beberapa faktor berpengaruh terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung:

#### 1) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan APBD Kota Bandar Lampung jika dilihat secara keseluruhan sudah terlihat cukup baik namun masih belum memenuhi target, berarti dalam pengelolaannya masih kurang maksimal sehingga hasil yang didapatkan pun tidak maksimal. Kepala Subbagian Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung Mengatakan Bahwa :

"Target penerimaan anggaran daerah harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Penyesuaian tersebut diutamakan dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan peran utama dalam melihat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Oleh karena itu disesuaikan dengan keadaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran yang bersangkutan dan penetapan targetnya diserahkan kepada pemerintah daerah."

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, seperti pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2018-2019 terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak begitu tinggi hanya berkisar 1%-2% saja, namun pada tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan yang sangat tinggi yaitu mencapai



59,39%. Kenaikan yang tinggi tersebut disebabkan oleh adanya COVID-19 yang mempengaruhi segala sumber pendapatan daerah, sehingga keuangan yang diperoleh daerah hanya sedikit dan memerlukan bantuan dana dari pusat untuk memenuhi kegiatan urusan pemerintahannya. Hasil perhitungan derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandar Lampung rata-rata sebesar 44,65%. jika diukur dengan skala presentase derajat ketergantungan keuangan daerah berada pada skala 40,01-50,00. Dari skala tersebut dapat diartikan bahwa rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandar Lampung berada pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih bergantung pada pendapatan transfer.

Berdasarkan penjelasan Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung bahwa :

“Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung masih rendah sehingga masih memiliki ketergantungan dengan dana transfer untuk mencukupi belanja pemerintahan. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan daerah Kota Bandar Lampung masih belum maksimal pemungutannya terutama terganggu pada saat corona sehingga kontribusi dari pendapatan asli daerahnya masih rendah yang menyebabkan ketergantungan keuangan daerah meningkat.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menyebabkan ketergantungan daerahnya menjadi tinggi dan akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan dengan hasil yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pihak eksternal. Begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat rasio kemandirian keuangan yang dihasilkan, maka itu menunjukkan bahwa semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pihak eksternal pemerintah daerah. Rumus

yang digunakan dalam menghitung besar kecilnya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung rata-rata 96,18%. Jika diukur dengan skala interval maka Kota Bandar Lampung berada pada skala 75-100, sehingga dapat diartikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung berada pada skala interval delegatif. Pola hubungan delegatif yaitu sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal membantu pengelolaan daerahnya. Walaupun sudah dapat terbilang mandiri, namun Kota Bandar Lampung masih tetap membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk memenuhi belanja kegiatan pemerintahannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung masih belum dapat memenuhi belanja pemerintahannya.

Keadaan tersebut terjadi dikarenakan walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tiap tahunnya cukup besar akan tetapi masih belum mampu membiayai urusan pemerintahannya sendiri, selain itu PAD Kota Bandar Lampung masih tidak sebanding dengan pendapatan transfer. Sehingga kontribusi terbesar dalam total pendapatan adalah dari pendapatan eksternal. Dengan besarnya kontribusi dari pendapatan eksternal maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih terbilang rendah.

Berdasarkan hasil dari perhitungan setelah menggunakan berbagai rasio, dapat menunjukkan bahwa peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh besar terhadap kemandirian keuangan suatu daerah baik dilihat dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, sampai pada kemandirian keuangan daerah. Semua perhitungan dari rasio di atas itu dapat memperkuat pernyataan bahwa pentingnya sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh dalam menunjang kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada 2 Desember 2022 dengan Anita Rahmalia, SH., MH., selaku Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro, menjelaskan bahwa program pelatihan sulam tapis yang sudah dilakukan dengan baik. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang terbaru dalam meningkatkan skil pengrajin kain tapis dalam menyulam atau menyusun benang di dalam kain tersebut sehingga kualitas produk kain tapis di Kota Metro bisa bersaing dengan produk produk pengrajin di seluruh Provinsi Lampung.

Tindakan ini selaras dengan apa yang di sampaikan Sulisiyani (2004:83), melalui sentuhan penyadaran dapat merangsang kesadaran terhadap perlunya memperbaiki kondisi agar lebih baik. Sentuhan penyadaran tersebut dilakukan oleh Dinas Koprasi, UMKM, dan perdagangan Kota Metro dalam bentuk Program Pelatihan Sulam Tapis. Setelah difasilitasi berupa program pelatihan sulam tapis supaya di situlah tempat belajar mereka dalam meningkatkan kualitas kain tapis, diharapkan muncul kesadaran pada diri pengrajin tersebut bahwa produksi kain tapis mereka belum maksimal.

## 2) Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap transformasi kemampuan ini berfungsi guna menambah wawasan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengrajin kain tapis. Terdapat dua indikator penting pada tahapan ini yakni adanya proses belajar pengetahuan dasar mengenai usaha industri kerajinan kain tapis. Indikator lainnya adalah terbukanya wawasan dan menguasai keterampilan dasar sesuai dengan tuntutan kebutuhan perajin tapis.

Pada indikator pertama, pengetahuan dan kecakapan dasar dapat diperoleh melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dasar terhadap pelaku kerajinan kain tapis di Kota Metro. Indikator ini menjadi kesempatan bagi pengrajin untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas diri guna memproduksi kain menjadi lebih unggul sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.



Sedangkan pada indikator kedua, terbukanya wawasan dan penguasaan terhadap keterampilan dasar dapat diperoleh setelah memenuhi indikator pertama. Indikator kedua menjadi hasil atas dilakukannya indikator pertama oleh para pelaku usaha. Dengan diadakannya proses belajar yang disertai dengan pendampingan oleh pemerintah, masyarakat cenderung memiliki penambahan wawasan serta keterampilan sebagai pengrajin kain tapis.

### 3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Kecakapan Keterampilan.

Pada tahap ini, terbentuk inisiatif dan inovatif pada masyarakat, sehingga mereka mampu secara mandiri berperan sebagai pelaku utama pengembangan produk kerajinan kain tapis yang didukung oleh pemerintah sebagai fasilitator. Untuk mengukur keberhasilan tahap ketiga dari pemberdayaan ini, terdapat tiga indikator yang menjadi bahan acuan penulis. Pertama, pelaku usaha kain tapis perlu memiliki dan memahami manajemen usaha yang baik. Sehingga, mereka dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan produk yang inovatif.

Kedua, pelaku usaha perlu melakukan peningkatan terhadap teknis, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Kota Metro Ibu Anita Rahmalia, S.H., M.H., pengrajin tenun tapis perlu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya di tengah meningkatnya persaingan industri tata busana di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan kualitas kain tapis yang diproduksi. Di samping itu, inovasi dalam pemilihan motif termasuk salah satu urgensi dalam meningkatkan nilai ekonomi produk. Motif yang dihasilkan oleh pengrajin tapis bentuknya beraneka ragam, seperti ragam hias geometri, yaitu ragam hias berbentuk persegi seperti wajik. Ragam hias flora dan fauna, yang umumnya dijadikan motif adalah bunga dan sulur (menjulang) membentuk simetris pada bidang dasar kain. Ragam hias sulur berupa sulaman berbentuk tali.

Ketiga, memperbaiki manajemen efisiensi usaha dalam mengembangkan jaringan usaha. Kepala Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Substansi Bina Sarana Industri, Maria Nelvi, S.IP menjelaskan

bahwa kemampuan pengrajin kain tapis sudah mengalami perkembangan dalam produksi kain tapis mereka, motif yang beragam juga bentuk dan jenisnya lebih variatif. Selain itu, para perajin juga menjalin kerja sama dan bersaing secara sehat antar kelompok perajin.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan PAD yakni belum optimalnya pemungutan objek pajak ataupun retribusi yang menyebabkan jumlah yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, terhentinya beberapa objek pajak dan retribusi saat pandemi COVID-19 lalu mengakibatkan sempat terhentinya proses pemungutan tersebut. Kemudian, minimnya Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dan adanya politik penganggaran nasional.

Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD adalah mendata berbagai sumber potensi pendapatan asli daerah, membarui data wajib pajak termasuk pendataan wajib pajak baru dan penetapan ulang besaran wajib pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendapatan dan diterbitkannya OPD hingga diterimanya pembayaran pajak pada kas daerah, meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terutama akan kewajibannya dalam membayar pajak, melalui kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan dinas-dinas terkait di daerah.

## **IV. KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian mengenai “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung” adalah hasil pengukuran rasio yang didapat dengan diambil rata-rata hasil dari 4 tahun anggaran Kota Bandar Lampung yaitu rasio derajat desentralisasi 41,26% pada kriteria yang terbilang baik, rasio derajat ketergantungan 44,65% pada kriteria ketergantungan dengan kategori tinggi, dan rasio kemandirian keuangan 96,18% pada kriteria yaitu delegatif.

Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung adalah Pedapatan Asli Daerah yang belum optimal karena kurang maksimalnya pemungutan pajak dan retribusi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak; Minimnya kontribusi BUMD dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Adanya politik anggaran nasional menyebabkan kurangnya potensi pendapatan daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung yaitu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung seperti menambah potensi kapasitas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung; Mempermudah sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan yang mengikat tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan Melakukan upaya meningkatkan ketaatan masyarakat agar membayar wajib pajak dan retribusi daerah diikuti dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan peningkatan, kualitas, ketepatan, kemudahan sarana dan prasarana, dan kecepatan dalam memberikan pelayanan. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi minimnya kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD adalah menindaklanjuti peraturan perundang-undangan, perbaikan kelembagaan BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam berjalannya pengelolaan BUMD, serta melakukan berbagai kegiatan guna mendukung implementasinya dengan pembentukan tim pembinaan BUMD. Di samping itu, upaya mengatasi terjadinya politik anggaran nasional yaitu dengan melakukan koordinasi kembali terkait kebijakan yang dibuat dan kemudian meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, referensi dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis juga menyadari masih barunya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pendapatan



Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung guna untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Kepala Subbagian Perencanaan BPKAD, dan Kepala Akuntansi PPKD BPKAD yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Komarudin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi IX. Bogor: Bumi Aksara.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yoyakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandar Lampung : PT. Alfabet.

Tolosang, Krest D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No 3.

Purnamasari,Dwi. (2019). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014

Neuman, W. L. (2006). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, sixth edition. Boston: Pearson Education, Inc

Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.

Orocomna, Manasep. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.2 No.3

